

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seperti kita ketahui bersama, telah terjadi beberapa konflik horizontal di tahun 2019 diantaranya beberapa konflik ditandai oleh sentimen-sentimen Keagamaan, kedaerahan, dan ras di antaranya ketegangan di Papua, menguatnya politik identitas, dan aksi teror terhadap penganut agama dan kepercayaan tertentu. Sedangkan di tahun 2021 ini kembali kita digemparkan dengan peristiwa yang memilukan yaitu terjadinya ledakan bom di depan gereja katedral Makasar pada hari minggu tanggal 28 April 2021 pukul 10.28 WITA. Dari berbagai informasi yang beredar ledakan bom tersebut berasal dari dua pengendara motor yang berusaha masuk ke halaman gereja yang pada saat itu merupakan hari peribadatan para jemaat gereja. Diduga kuat peristiwa ini merupakan suatu upaya bom bunuh diri yang dilakukan oleh sepasang suami istri. “Akibat kejadian itu, dua orang yang diduga pelaku dilaporkan tewas, serta 20 orang terdiri dari warga, petugas keamanan gereja, dan jemaat mengalami luka akibat ledakan” (Kompas.com).

Selanjutnya hanya berselang dua hari setelah peristiwa ledakan bom di Makasar, pada Rabu tanggal 31 Maret 2021 kembali terjadi aksi teror yang pada kali ini berlokasi di Mabes Polri. Dalam video amatir dan rekaman CCTV yang disiarkan Kompas TV memperlihatkan terduga teroris berjalan dari arah pintu masuk pejalan kaki atau pintu belakang Mabes Polri yang memang untuk umum. Menurut pemberitaan Kompas.com, (31/3/2021), dia melepaskan tembakan lalu polisi pun membalasnya hingga pelaku teror tersebut tewas di tempat.

Berbagai aksi teror dari tahun ke tahun seperti tiada henti, hal ini tentunya merupakan suatu preseden buruk yang berimplikasi negatif terhadap stabilitas nasional yang juga menjadi ancaman serius terhadap keutuhan bangsa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwsanya berbagai aksi teror bom yang terjadi kerap kali dikaitkan dengan kelompok keagamaan tertentu, apabila ini terus dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan akan meletupkan konflik antar umat beragama.

Menurut Hanafi (2018) Konflik berbasis sentimen keagamaan yang kerap terjadi di tengah masyarakat diakibatkan oleh fanatisme yang berlebihan, yang

**Yan Mahdi Muhamad, 2021**

***Internalisasi Nilai Toleransi dalam Menangkal Radikalisme di Kalangan Mahasiswa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan.***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

selanjutnya menjalar pada ranah fundamentalisme. Konflik yang terjadi menandakan bahwasanya nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran inti keagamaan belum dipraktikkan secara proporsional di dalam kehidupan sehari-hari seorang individu, maka dari itu kiranya dibutuhkan suatu upaya untuk merevitalisasi nilai-nilai keagamaan untuk dapat mengantisipasi terjadinya konflik dengan sentimen keagamaan. Merespon hal tersebut beberapa opsi yang bermanfaat dalam meminimalisir permasalahan tersebut yaitu; *Pertama*, Dialog Parlemen (*Parliamentary Dialogue*). *Kedua*, Mediasi; *Ketiga*, Pendidikan Pluralisme; *Keempat*. Penegakan Hukum yang tegas dan berkeadilan; dan *Kelima*, Pembinaan Etika (akhlak).

Pada akhir tahun 2020, fanatisme agama yang berlebihan kembali marak terjadi. Salah satu gejalanya ditandai ketika Habib Rizieq Shihab selaku Imam besar atau pemimpin FPI (Front Pembela Islam) kembali pulang ke Indonesia setelah sebelumnya menetap untuk beberapa waktu di Arab Saudi. FPI adalah salah satu organisasi masyarakat (ormas) yang sarat akan kontroversi sebagaimana banyak media yang menyorohtnya. Kontroversi terbaru terjadi di bulan Desember 2020 yaitu kasus meninggalnya enam orang anggota laskar FPI yang diduga terlibat baku tembak dengan aparat kepolisian, saat hendak melakukan penangkapan terhadap Habib Rizieq yang terindikasi melakukan tindak pidana penghasutan kerumunan.

Aktivitas gerakan FPI membuat sebagian masyarakat merasa terusik dengan berbagai tindakan yang tidak jarang dipenuhi oleh aksi kekerasan dan telah direduksi menjadi aksi teror, seperti penggerebekan kelab malam dan tempat-tempat yang ada. tidak etis. Metode perusakan benda dan harta benda milik orang lain, penyisiran warga negara tertentu, dan kewenangan negara hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum (Mufid, 2009). Selain itu FPI juga terlibat dalam berbagai tindakan intoleran seperti penutupan gereja dan konflik dengan berbagai organisasi keagamaan lainnya.

Puncak dari berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota FPI, dilansir dari (Merdeka.com) pada tanggal 30 Desember 2020 Pemerintah menyatakan pelarangan terhadap seluruh aktivitas dan penggunaan simbol serta atribut FPI di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian hal tersebut

menandakan bahwasanya FPI telah kehilangan hak legalnya sebagai ormas maupun organisasi biasa di Indonesia.

Reformasi 1998 menjadi titik balik berkembangnya berbagai ormas Islam dan kekuatan politik Islam di Indonesia. Di era orde baru, ormas Islam dan kekuatan politik Islam mengalami berbagai tekanan dan batasan di ruangnya, karena pemerintah saat itu menganggap ormas Islam dan kekuatan politik Islam sebagai ancaman serius terhadap hegemoni yang ada. Sifat reformasi membuka jalan bagi berbagai ungkapan dan ekspresi terkait kebebasan politik dan suasana demokratisasi. Kebebasan berekspresi yang dihasilkan bukan hanya awal dari gerakan politik Islam skala besar. Lebih penting lagi, berbagai ormas Islam yang terkenal dengan pandangan konservatif dan garis kerasnya pun muncul kembali, dan masih terkesan tak terbandung hingga saat ini.

Minimnya pengawasan dan aturan yang longgar terhadap perkembangan gerakan Islam yang bersifat kekerasan dan intoleran pada akhirnya akan menimbulkan problematika di kemudian hari. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Wahid Institute (2020) di dapati data bahwa fenomena intoleransi di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang semula 46% sekarang ini menjadi 54%. Tren peningkatan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: persaingan politik, dakwah (ceramah) yang bermuatan ujaran kebencian, dan unggahan ujaran kebencian di berbagai *platform* media sosial. (Media Indonesia, 2020).

Kehidupan abad ke-21 yang sangat erat kaitannya dengan penggunaan teknologi turut berperan dalam meningkatnya intoleransi di Indonesia. Hal ini terlihat jelas dari beragamnya konten ujaran kebencian yang begitu mudahnya tersebar luas di berbagai *platform* aplikasi media sosial. Di sisi lain, beberapa tokoh agama Islam dengan basis massa yang cukup besar juga di dapati kerap melakukan ujaran kebencian dan ujaran yang bertolak belakang dalam usaha menjaga suasana keharmonisan kehidupan masyarakat seluruh suku bangsa di Indonesia

Kebencian terhadap sentimen agama mungkin bisa menjadi titik awal yang serius bagi berbagai aksi ekstremis dan rangkaian aksi teror yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena kekerasan beragama diawali dengan

**Yan Mahdi Muhamad, 2021**

***Internalisasi Nilai Toleransi dalam Menangkal Radikalisme di Kalangan Mahasiswa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan.***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pemahaman eksklusif terhadap doktrin agama, kemudian membentuk sikap sosial yang intoleran, yang mewujud dalam sifat kekerasan, dan diiringi dengan aksi teror dan aksi radikal untuk melawan berbagai kelompok yang pada akhirnya menimbulkan rasa permusuhan dan menjadi benih aksi teror.

Catatan sejarah perkembangan gerakan Islam menunjukkan bahwa terdapat relevansi yang kuat diantara mobilisasi gerakan radikal dengan perubahan pola sosial politik. Gerakan Darul Islam, yang lahir dan ditindas dalam waktu singkat pada masa awal kemerdekaan Indonesia, mengilhami penyebaran ide-ide Islam "anti-negara" (van Bruinessen, 2002, hlm. 54). Selain itu, fenomena globalisasi telah mempercepat perkembangan radikalisme. Globalisasi memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam penyebaran paham radikal. Hal ini relevan sebab perubahan sosial yang ditimbulkan oleh globalisasi tidak hanya mengancam nilai-nilai tradisional masyarakat, tetapi juga memangkas jarak ruang dan waktu antar wilayah (Rabasa & Benard, 2014).

Tindakan teroris tidak lebih dari kejahatan terorganisir, hal ini terlihat jelas dari keberadaan staf dan penyandang dana di lapangan. Selain itu, aksi terorisme adalah kejahatan transnasional yang mematikan. Kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan luar biasa, dampak yang paling serius antara lain dapat membahayakan perdamaian nasional dan internasional (Anggraeni dkk, 2019).

Dari segi kelembagaan atau organisasi, perkembangan jaringan gerakan radikal telah melemah dalam beberapa tahun terakhir, namun tidak berarti ancaman radikalisme di Indonesia telah sepenuhnya dihilangkan. Telah terbukti bahwa organisasi dengan ideologi radikal dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri untuk bertahan hidup. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa lembaga tersebut sebenarnya memiliki peranan yang memperluas penyemaian paham radikal, dari minoritas (terbatas) yang memiliki kekecewaan yang cukup besar terhadap kehidupan beragama menuju kepada minoritas yang mengalami kekecewaan jauh lebih rendah (Qodir, 2018).

Didorong oleh kelompok Islam garis keras seperti FPI dan GARIS (Gerakan Reformis Islam), penyebaran kebencian menjadi pionir terwujudnya berbagai intoleransi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk (multikultural). Terbentuknya sikap intoleran pada individu pada gilirannya dapat menjadi pintu

gerbang pemahaman ideologi radikal. Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa individu yang terpapar ideologi radikal dapat secara sadar setuju untuk melakukan aksi teror. Hal tersebut sejalan dengan hasil survei Pusat Penelitian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta di tahun 2017 yang mendapati hasil bahwa 34,3% anak muda yang disurvei setuju terhadap aksi jihad untuk melawan kelompok non-Islam. Di saat yang sama, antara lain, sikap intoleran dapat memicu terjadinya kekerasan agama yang dapat berkembang menjadi aksi terorisme (Faella Nisa,dkk. 2018).

Berdasarkan pemaparan di atas, tren intoleransi dan aktivisme radikal di Indonesia dapat dikatakan masih eksis, walaupun datanya mengalami fluktuasi. Salah satu faktor yang mendorong terjadinya intoleransi adalah maraknya ujaran kebencian yang tersebar luas di media sosial. Di Indonesia sendiri meningkatnya intoleransi dan radikalisme dapat disimpulkan turut di iringi dengan peningkatan aksi terorisme. Setidaknya dalam pemberitaan sejak 5 Juli 2016 terdapat beberapa aksi terorisme yang terjadi seperti, serangan bom bunuh diri di Mabes Polri pada tanggal 23 Mei 2017, serangan sebuah bom di Kampung Melayu di tanggal 13 Mei 2018, kemudian serangan bom yang meledak di sebuah gereja di Surabaya. Keesokan harinya, terjadi lagi peledakan bom di Mabes Polri Surabaya. Dua hari setelah serangan teroris di Polda Riau, pada 3 Juni 2019, sebuah bom menyerang polisi di Kartasura, Jawa Tengah (Azanella 2018; Tim liputan CNN 2019).

Kecepatan globalisasi telah membawa banyak perubahan sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat modern saat ini, serta telah mempengaruhi berbagai perubahan model dan strategi pembangunan jaringan radikal. Sebagai gerakan yang tidak terlihat, ia memiliki aktivisme bawah tanah. Kelompok radikal selalu melebarkan sayap dan menyesuaikan langkahnya dengan gagasan dan ajarannya sendiri untuk memperluas dan menarik masyarakat yang lebih luas dan bergabung dengan kelompoknya untuk mewujudkan cita-cita tatanan sosial dan bangsa.

Hasil penelitian Center for Religious and Intercultural Studies (CRCS) (2017) mengungkapkan bahwa kelompok radikal telah berhasil menyebarkan ideologi radikal melalui berbagai pola baru, seperti memanfaatkan pemikiran masyarakat yang permisif terhadap ideologi radikal di saat perkara kesenjangan,

**Yan Mahdi Muhamad, 2021**

***Internalisasi Nilai Toleransi dalam Menangkal Radikalisme di Kalangan Mahasiswa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan.***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan dirasa membelit kehidupan mereka. Melalui cara tersebut kelompok radikal berupaya menciptakan pola baru dalam mengembangkan jaringan kelompoknya (Bagir, 2018).

Melihat lebih jauh, rangkaian peristiwa terorisme bermula dari kelompok gerakan Islam garis keras. Seperti kasus bom bunuh diri M. Syarif di masjid Mabes Polres Cirebon pada tahun 2011 lalu, terlihat bahwa pelaku sebelumnya aktif dalam komunitas GAPAS (gerakan anti pemurtadan dan aliran sesat) yang ada di Cirebon. M. Syarif kemudian bergabung dengan jaringan kelompok militan dengan tujuan menerapkan metode dan strategi baru yang disebut "*istighlayat*", yang merupakan istilah untuk serangan skala kecil yang tidak bergantung pada kelompok militan yang lebih besar (Asrori, 2015).

Perkembangan jaringan ideologi radikal telah menarik banyak perhatian, menurut berbagai penelitian, anak muda merupakan kelompok yang paling rentan terhadap ideologi radikalisme, sehingga pada akhirnya tertarik untuk bergabung dengan kelompok ini. Hal ini bisa dimaklumi, karena organisasi radikalisme meyakini bahwa anak muda, terutama pelajar sekolah menengah dan mahasiswa, adalah kelompok masyarakat yang mengalami krisis identitas dan perlu mengambil tindakan nyata untuk menemukan jati dirinya. Di sisi lain mereka juga dipandang lugu dalam memaknai realitas dan perubahan sosial yang berlaku. Oleh karena itu cukup terbuka dan dapat menerima dengan baik berbagai input dan informasi berkaitan dengan gerakan keagamaan yang dipandang ideal sekaligus menginspirasi mereka untuk turut terlibat dalam mewujudkan cita-cita dari paham-paham radikal berbalut jubah agama tersebut.

Hasil penelitian Lembaga Penelitian Perdamaian Islam (LaKIP) tahun 2011 membenarkan fenomena tersebut, temuan menunjukkan bahwa 48,9% dari 100 sekolah menengah pertama dan atas negeri di ibu kota setuju untuk melakukan tindak kekerasan dalam jubah agama. Radikalisme dalam lingkungan pendidikan menjadi topik yang serius, sekaligus menjadi sinyal peringatan bagi para akademisi dan pengambil kebijakan untuk menemukan dan melakukan serangkaian upaya untuk secepatnya membendung dan menghentikan perkembangannya. Perkembangan radikalisme dalam pendidikan merupakan masalah praktis yang tidak terlihat dari fisik, namun keberadaan dan

perkembangannya tidak dapat disangkal. Seperti yang ditunjukkan oleh riset Setara Institute, sepuluh perguruan tinggi negeri terdampak radikalisme agama yang menyebar di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, dan NTB (Nusa Tenggara Barat) (Tirto.id, 2019).

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga melaporkan temuannya mengenai fenomena radikalisme. Berdasarkan data BNPT pada tahun 2017, sebanyak 39% pelajar di 15 provinsi Indonesia menyatakan minatnya pada radikalisme. Hasil survei tersebut membuat masyarakat semakin curiga bahwa generasi muda menjadi sasaran penyebaran paham (ideologi) radikal dan kampus dijadikan lokasi utama mengembangkan gerakan radikalisme. (Antara, Rabu, 26 Juli 2017). Sejalan dengan hal itu Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menjelaskan bahwa pengaruh paham dan ideologi radikal seiring waktu sangatlah mengkhawatirkan sebab masifnya gerakan radikal di kalangan kelompok strategis khususnya mahasiswa (Koran Jakarta, edisi 18 Juli 2017).

Pandangan di atas sejalan dengan upaya pemerintah untuk menghapus tiga dosa besar di dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi. Ketiga dosa besar tersebut atau tiga permasalahan itu yakni radikalisme/ekstrimisme, narkoba dan miras serta perundungan dan kekerasan seksual. Sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Prof Nizam bahwasanya kampus harus menjadi tempat yang steril untuk mewujudkan suasana pendidikan yang aman, nyaman, dan sehat. Beliau juga menambahkan bahwasanya kampus merupakan tempat melahirkan pemimpin bangsa dan intelektualitas yang kritis dan santun. Nilai-nilai kritis, kreatif, santun, budaya ketimuran tidak boleh dihilangkan. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat kita maknai bahwasanya pendidikan nilai merupakan upaya penting untuk mewujudkan karakter mahasiswa yang santun, kritis, kreatif serta toleran.

Berkaitan dengan fenomena radikalisme yang marak di ditemui di lingkungan pendidikan formal Taslim Syahlan (2015) menyimpulkan bahwasanya sekolah berperan penting dalam pelaksanaan upaya pemberantasan radikalisme. Dalam hal ini, sekolah perlu lebih aktif dalam menyebarkan pemahaman yang komprehensif tentang ajaran Islam; melalui promosi metode pembelajaran agama

**Yan Mahdi Muhamad, 2021**

***Internalisasi Nilai Toleransi dalam Menangkal Radikalisme di Kalangan Mahasiswa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan.***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

seperti dialog terbuka; sekolah juga harus bekerjasama dengan semua kegiatan keagamaan; selain terus melaksanakan pendidikan multikultural untuk meningkatkan toleransi berkenaan nilai kehidupan masyarakat Indonesia (termasuk ras, budaya, agama, dll).

Pandangan di atas sejalan dengan teori konstruktivisme sosial yang dikembangkan oleh Vygotsky. Teori konstruktivisme sosial lebih menitikberatkan interaksi dari faktor-faktor interpersonal (sosial), kultural-historis, dan individual sebagai kunci dari perkembangan manusia (Schunk, 2012. Hlm. 339). Ormrod (2012) menjelaskan lebih lanjut terkait konsep-konsep dalam teori konstruktivisme Lev Vygotsky, menurut Ormrod, Vygotsky mengungkapkan bahwa Berkembangnya proses mental yang kompleks terjadi setelah anak (Individu) melakukan aktifitas sosial, dan secara bertahap akan terinternalisasi dalam kognitif anak yang dapat dipergunakan secara bebas. Vygotsky mengemukakan bahwa proses berfikir yang kompleks sangat tergantung pada interaksi sosial dari seorang individu. Sebagaimana anak mendiskusikan tentang peristiwa, objek dan masalah dengan orang dewasa dan orang lain yang lebih berpengetahuan, maka secara bertahap hasil diskusi tersebut akan menjadi bagian dalam struktur berpikir si anak.

Keberagaman yang ada dalam masyarakat Indonesia merupakan aset bangsa yang harus selalu dijaga kelestariannya, karena merupakan wujud keberagaman lokal yang harus dilestarikan dan berdampak pada penguatan integrasi etnis. Namun di sisi lain, keberagaman juga memiliki potensi menciptakan konflik yang berujung pada disintegrasi etnis, serta menimbulkan perselisihan di masyarakat yang di latar belakang oleh isu SARA (Suku, agama, ras, dan antar golongan).

Keberagaman SARA sangatlah berpotensi menyebabkan perselisihan antar kelompok dan atau individu perorang apabila tidak disikapi dengan baik dan bijaksana, bahkan perbedaan pendapat atau pandangan terkadang juga menjadi penyebab pecahnya suatu konflik. Perbedaan pemahaman dan pendapat merupakan tren dan mungkin menjadi awal konflik antar kelompok. Selain itu, rendahnya toleransi antar komunitas dapat mendorong pecahnya konflik dan memicu berbagai perilaku intoleran yang dapat memicu aktivitas keagamaan, terutama gerakan radikal dan aksi teror yang berbalut Agama Islam.

**Yan Mahdi Muhamad, 2021**

***Internalisasi Nilai Toleransi dalam Menangkal Radikalisme di Kalangan Mahasiswa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan.***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



Ancaman gerakan radikalisme merupakan ancaman yang nyata, mengingat situasi demografi masyarakat Indonesia yang berbeda dan beragam seringkali menjadi titik rawan meletusnya ketegangan antar suku yang kerap berujung pada konflik kekerasan dan aksi terorisme, seperti bom gereja di Surabaya. 2019. Mengantisipasi dan melawan perkembangan radikalisme membutuhkan serangkaian upaya dan langkah strategis. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan ruang pendidikan melalui mata kuliah PKn sebagai wadah untuk menginternalisasikan nilai-nilai kebangsaan, khususnya nilai toleransi di perguruan tinggi.

Nilai toleransi dapat menjadi aset karakter yang berharga bagi individu untuk menghindari ancaman radikalisme dan fundamentalisme agama yang dapat mengancam keutuhan dan persatuan bangsa. Selain itu, mengingat keberadaan mahasiswa yang dijadikan sasaran rekrutmen anggota baru kelompok radikal terorisme, maka internalisasi nilai-nilai toleransi dapat menjadi upaya yang tepat dalam proses *de-rooting*, khususnya di perguruan tinggi.

Pendidikan merupakan sektor kunci yang dapat memainkan peran terbesarnya sebagai langkah preventif terhadap meningkatnya ancaman radikalisme di perguruan tinggi. Dengan menggunakan dan mengesahkan setiap lini pembelajaran departemen pendidikan kita, kita dapat meningkatkan, menginisiasi, memperkuat dan menyempurnakan proses pendidikan dasar, yaitu pendidikan nilai kepribadian yang penuh dengan nilai kehidupan. Pendidikan memegang peranan penting dalam strategi pembentukan karakter bangsa, khususnya dalam pendidikan kewarganegaraan, salah satu tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk membentuk nilai dan karakter warga negara (membentuk karakter bangsa). Pendidikan kewarganegaraan adalah sarana pendidikan yang strategis dengan misinya yang bertujuan untuk mencerdaskan setiap warga negara Indonesia melalui lingkup kajian “pendidikan berbasis nilai” (Sunarso, 2006).

Hermanto (2013 hlm. 231) menjelaskan bawa:

“Pendidikan warga negara memegang peranan yang krusial dalam membangun mentalitas, sikap dan perilaku yang harmonis, damai dan toleran tanpa menghilangkan keberagaman yang dianugerahkan oleh negara Indonesia”.

Yan Mahdi Muhamad, 2021

***Internalisasi Nilai Toleransi dalam Menangkal Radikalisme di Kalangan Mahasiswa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan.***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dalam pembangunan peradaban di Indonesia, khususnya dalam pembentukan karakter bangsa, pendidikan kewarganegaraan mempunyai tujuan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut maka tidak dapat disangkal bahwa Pendidikan Kewarganegaraan harus dipelajari pada tiap jenjang pendidikan formal, dimulai dari jenjang sekolah dasar, menengah, lalu perguruan tinggi.

Ditinjau secara historis, pembangunan karakter bangsa merupakan motor penggerak penting bagi perjalanan suatu bangsa.. Dalam sosial budaya, pembentukan karakter bangsa merupakan syarat yang diperlukan untuk meningkatkan rasa jati diri bangsa dalam masyarakat multikultural, karena kecenderungan ini mudah menimbulkan gesekan antar kelompok, sekaligus mendorong penetrasi pemikiran radikal. Ide-ide ini dapat dengan mudah menyusup ketika terjadi berbagai ketegangan antar kelompok agama sering terjadi.

Menurut Branson (dalam Winataputra & Budimansyah, 2007) Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk warga negara yang baik berperan dalam mengembangkan tiga kompetensi yang sepatutnya dikuasai oleh setiap warga negara, ketiga kompetensi tersebut yaitu warga negara yang bepengetahuan (*civics knowledge*), warga negara yang cakap (*civics skill*) dan warga negara yang berkarakter (*civics dispositions*). Ketiga kompetensi tersebut dijiwai oleh sumber nilai yang sama yaitu bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai ruh dari bangsa Indonesia. Apabila ketiga kompetensi tersebut telah melekat dalam jiwa dan kepribadian seorang warga negara, maka secara langsung ataupun tidak warga negara tersebut merupakan seorang individu yang kompeten, memiliki komitmen, memiliki kepercayaan diri dan toleran.

Namun dalam proses penerapan nilai-nilai kebangsaan, khususnya internalisasi nilai toleransi, keberadaan PKn seolah-olah mengalami stagnasi, hanya bersifat formal dan pendidikan nilai yang terdapat di dalamnya belumlah dijiwai sepenuhnya oleh peserta didik. Selain itu, hingga saat ini pelaksanaan PKn di perguruan tinggi tampaknya belum memberikan hasil konkret dalam mendukung upaya menangkal gerakan radikalisme di perguruan tinggi.

Menurut Syukri (2009) Masyarakat Indonesia masih berharap dapat menggunakan pendidikan tinggi sebagai tempat untuk mengamalkan dan mendidik putra putri mereka agar menjadi intelektual yang berilmu dan terpuji. Ironisnya, tidak ada universitas yang bisa menjamin alumnusnya akan memiliki karakter dan kepribadian yang baik. Di samping, misi pendidikan tinggi yang memuat aspek pengajaran, penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan. Sebagaimana dikatakan oleh Arthur (dalam Syukri, 2009) secara khusus, pengembangan karakter tidak dianggap sebagai tugas universitas. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan kepribadian terkait dengan internalisasi nilai toleransi perguruan tinggi akan menghadapi tantangan tersendiri.

Schwartz (2000) mengatakan terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang akan di hadapi oleh perguruan tinggi dalam melaksanakan pendidikan karakter yang dipengaruhi oleh berbagai pandangan yang keliru yaitu :

1. Karakter setiap individu adalah tanggung jawab orang tua dan karakter tersebut sudah melekat secara utuh ke dalam kepribadian seorang individu sebelum ia masuk ke perguruan tinggi.
2. Dosen selaku pendidik tidak berwenang untuk membentuk maupun mengembangkan karakter mahasiswa, diakrenakan hal tersebut bukanlah termasuk dari tugas seorang dosen.
3. Karakter adalah suatu istilah yang berorientasi kepada ajaran agama atau ideologi tertentu, sedangkan perguruan tinggi di barat (Eropa) pada umumnya melepaskan keterkaitan institusi pendidikan formal dengan agama atau ideologi tertentu.

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan formal yang memiliki fungsi dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul guna mendorong perbaikan kualitas SDM memikul tugas penting untuk merealisasikan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang perguruan tinggi. Menurut Syukri (2009) salah satu Aspek yang sangat penting untuk disadari adalah perguruan tinggi tidak akan mungkin dapat secara mandiri memberikan pendidikan individualitas. Perguruan tinggi harus menyadari bahwa kerjasama dengan *stakeholders* (dalam hal ini orang tua dan masyarakat sekitar) sangatlah dibutuhkan.

Begitu pula peran pemerintah melalui BNPT, dan peran polisi serta instansi terkait tak kalah pentingnya dalam merumuskan dan melaksanakan rangkaian upaya menegakkan nilai toleransi sosial. Meskipun berbagai strategi dan metode yang diterapkan oleh masing-masing lembaga berbeda, namun memiliki tujuan yang sama untuk mendorong dan memotivasi masyarakat, khususnya mahasiswa agar dapat mengembangkan keterampilan moral pribadi, terutama sikap dan perilaku yang toleran, di bawah bayang-bayang gelap ancaman radikalisme di perguruan tinggi Indonesia.

Berdasarkan kompleksitas persoalan yang telah dipaparkan di atas berkenaan dengan banyaknya kejadian kasus intoleransi di ikuti perkembangan gerakan radikalisme yang mengancam kerukunan dan kerharmonisan hidup masyarakat Indonesia, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji secara mendalam bagaimana proses dan efektivitas internalisasi nilai toleransi melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu langkah strategis dalam bidang pendidikan untuk menangkal perkembangan gerakan radikalisme yang jauh lebih besar dan sangat mengkhawatirkan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, kajian utama rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan Internalisasi Nilai Toleransi dalam Menangkal Radikalisme di Kalangan Mahasiswa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan?”

Berdasarkan rumusan masalah di atas, agar lebih spesifik, maka penulis membatasi masalah tersebut dengan tiga rumusan pertanyaan berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan internalisasi nilai toleransi dalam menangkal radikalisme di kalangan mahasiswa melalui pendidikan kewarganegaraan?
2. Bagaimana hasil dari pelaksanaan internalisasi nilai toleransi dalam menangkal radikalisme di kalangan mahasiswa melalui pendidikan kewarganegaraan?
3. Bagaimana kendala dan upaya dari pelaksanaan internalisasi nilai toleransi dalam menangkal radikalisme di kalangan mahasiswa melalui pendidikan kewarganegaraan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengetahui bagaimana Internalisasi Nilai Toleransi dalam Menangkal Radikalisme di kalangan Mahasiswa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Mengetahui Proses pelaksanaan internalisasi nilai toleransi dalam menangkal radikalisme di kalangan mahasiswa melalui pendidikan kewarganegaraan.
2. Menunjukkan Hasil dari pelaksanaan internalisasi nilai toleransi dalam menangkal radikalisme di kalangan mahasiswa melalui pendidikan kewarganegaraan.
3. Menganalisis Kendala dan upaya dari pelaksanaan internalisasi nilai toleransi dalam menangkal radikalisme di kalangan mahasiswa melalui pendidikan kewarganegaraan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini secara umum adalah untuk mewujudkan kehidupan dan suasana akademik kampus yang damai dan harmonis. Senantiasa mengedepankan sikap toleransi di tengah keberagaman dan perbedaan sesuai dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Selain itu penelitian ini juga memuat beberapa manfaat sebagai berikut.

#### **1. Segi Teoritis**

Salah satu manfaat dari penelitian ini adalah sebagai pengembangan keilmuan PKn yang di dalamnya memuat tentang pentingnya pendidikan nilai, khususnya nilai toleransi dalam menangkal paham radikalisme di kalangan mahasiswa. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan rujukan kajian mengenai Internalisasi Nilai Toleransi dalam Menangkal Radikalisme di kalangan Mahasiswa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

#### **2. Segi Kebijakan**

Penelitian ini digunakan untuk menjadi pembanding terhadap kebijakan, baik kebijakan yang sedang berlaku (*ius contitutum*) sekarang maupun kebijakan yang akan diberlakukan nantinya (*ius constituendum*). Dengan memperdalam

Yan Mahdi Muhamad, 2021

*Internalisasi Nilai Toleransi dalam Menangkal Radikalisme di Kalangan Mahasiswa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan.*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kajian tentang internalisasi nilai toleransi dalam menangkal radikalisme di kalangan mahasiswa melalui pendidikan kewarganegaraan, maka dapat menjadi bahan evaluasi guna memberikan kebijakan yang komprehensif dan objektif di lingkungan perguruan tinggi berkenaan dengan posisi PKn sebagai salah satu sarana strategis dalam melaksanakan upaya deradikalisasi di kalangan mahasiswa.

### **3. Segi Praktis**

- 1) Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam upaya pendidikan karakter melalui Pendidikan Kewarganegaraan dalam menyemai nilai toleransi kebinekaan di perguruan tinggi.
- 2) Bagi mahasiswa maupun masyarakat umum, penelitian ini dapat berguna sebagai sumber informasi akan pentingnya Internalisasi Nilai Toleransi dalam Menangkal Radikalisme di kalangan Mahasiswa.
- 3) Bagi perguruan tinggi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran mengenai pelaksanaan Internalisasi Nilai Toleransi dalam Menangkal Radikalisme di kalangan Mahasiswa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

### **4. Segi Isu Sosial**

Penelitian ini dapat membangun paradigma positif mahasiswa secara khusus dan masyarakat secara umum berkenaan dengan bagaimana menyikapi kehidupan bermasyarakat yang beragam melalui pengembangan nilai karakter toleransi yang senantiasa saling menghargai dan mengormati, dengan demikian secara jangka pendek ataupun panjang potensi dari ancaman radikalisme dan terorisme dapat di deteksi sedini mungkin untuk dapat dicegah dan diantisipasi.

## **1.5 Struktur Organisasi Tesis**

Struktur organisasi Tesis ini terdiri dari lima bab, diantaranya:

1. BAB I Pendahuluan, meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi Tesis.
2. BAB II merupakan Kajian Pustaka, yang meliputi konsep dan teori pendukung, pendapat ahli dan hasil penelitian sebagai bahan penelitian penulis, guna memberikan landasan kokoh akan urgensi penelitian yang diteliti.

3. BAB III Metode Penelitian, meliputi desain penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data serta komponen lainnya yang dijelaskan secara rinci.
4. BAB IV Temuan dan Pembahasan, meliputi data hasil temuan dan pembahasan teori-teori yang ada serta dari data pendukung. Melalui langkah ini, peneliti akan melihat masalah yang sedang diteliti dan solusi yang diberikan atas permasalahan yang ditemukan tersebut.
5. BAB V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi, meliputi simpulan baik secara umum maupun simpulan secara khusus sesuai dengan tujuan penelitian, pemaparan implikasi dan menyajikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai solusi atas hasil penelitian dari permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam penelitian ini. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan masyarakat secara umum.